

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Desember 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARI ASTUTI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **876939**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m²/17 m² di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m²/50 m² di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **175.000.000**

1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA P5E02R22M1 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **13.482.712****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **888.482.712****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **888.482.712**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.